

PENGUATAN STRATEGI KOMUNIKASI DAN INTEGRITAS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS: DPRD DELI SERDANG)

Agnita Yolanda*¹, Adinda Annisa Harlyanti², Aqila Nafisa³, Melisa Fitri⁴

Universitas Medan Area, Medan

e-mail: ¹agnitayolanda@staff.uma.ac.id, ²adinda.annisa.harlyanti6@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Deli Serdang Regency in increasing public participation through effective political communication, as well as to explore the utilization of digital technology in strengthening the relationship between DPRD and the public. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews with DPRD members, observation of DPRD activities, and analysis of related documents. The results show that the DPRD of Deli Serdang has significant efforts to improve performance and integrity through programs that address basic needs such as healthcare and employment. Open communication between representatives and constituents has proven to be crucial in strengthening public participation, increasing transparency, and improving the image of the DPRD. Furthermore, the use of digital technology, such as social media and e-catalogs for budgeting, has become an effective strategy to enhance interaction between the DPRD and the public. This study also identifies the importance of internal supervision to maintain the integrity of council members, as well as the need for closer collaboration with the local government to achieve sustainable development.*

Keywords: DPRD, Integritas, Communication Strategy.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komunikasi politik yang efektif, serta mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, observasi terhadap kegiatan DPRD, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Deli Serdang memiliki upaya yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan integritas melalui program-program yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pekerjaan. Komunikasi terbuka antara wakil rakyat dan konstituen juga terbukti penting dalam memperkuat partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki citra DPRD. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan e-katalog untuk belanja anggaran menjadi strategi efektif dalam meningkatkan interaksi antara DPRD dan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pengawasan internal untuk menjaga integritas anggota dewan, serta perlunya kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: DPRD, Integritas, Strategi Komunikasi.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mewakili

masyarakat dalam pemerintahan daerah. Sebagai lembaga yang memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dituntut

untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan otonomi daerah guna mendorong kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rozinovianti & Alfian, 2023).

Fungsi utama DPRD mencakup pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Sebagaimana disampaikan oleh Azahra & Lubis (2021), fungsi penganggaran diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan secara bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sementara itu, fungsi pengawasan berperan strategis dalam manajemen pemerintahan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, dengan harapan bahwa pengawasan yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan.

Di Kabupaten Deli Serdang, peran DPRD semakin penting mengingat dinamika tantangan pembangunan yang terus berkembang, termasuk kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel. Dalam hal ini, DPRD dituntut untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan integritas guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh DPRD adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Partisipasi publik yang terbatas berpotensi menghambat terciptanya pembangunan inklusif yang mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Komunikasi politik, yang dipahami sebagai proses di mana individu belajar untuk mengadopsi norma, nilai, sikap, dan perilaku yang diterima oleh sistem politik yang berlaku (McLeod & Lee, 2016 dalam Permana et al., 2020), memegang peran krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunikasi politik yang efektif dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,

sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial-ekonomi masyarakat, seperti peningkatan angka pengangguran, kesenjangan akses layanan kesehatan, dan kebutuhan perlindungan sosial yang semakin mendesak. Dalam konteks ini, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pemulihan ekonomi ketika terjadi ketidakpastian ekonomi melalui penguatan program jaminan sosial, bantuan sosial, serta kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan (Raainaa & Zahrurrijal, 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, DPRD juga menghadapi peluang dan tantangan baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media digital. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi bertujuan untuk mengatasi tantangan komunikasi yang ada, seperti jarak, waktu, dan keterbatasan akses informasi (Nur & Jidan, 2024). Namun, adopsi teknologi ini memerlukan strategi komunikasi yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komunikasi politik yang efektif, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat komunikasi antara DPRD dan masyarakat, serta mengidentifikasi strategi komunikasi yang dapat meningkatkan transparansi, integritas, dan inklusivitas dalam pengambilan kebijakan publik.

Public Relations (PR) Merupakan kegiatan yang mencakup seluruh komunikasi yang direncanakan, baik internal maupun eksternal organisasi, dengan tujuan untuk mencapai sasaran

tertentu (Maryam & Priliantini, 2018 dalam Ali & Widodo, 2022). Dalam konteks pemerintahan, PR merujuk pada upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara pemerintah dan publik. PR berfungsi untuk menjelaskan kebijakan publik, mengedukasi masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh lapisan masyarakat. PR tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan pemerintah, tetapi juga dalam menciptakan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga legislatif yang memiliki peran vital dalam pembangunan daerah. Sebagai wakil rakyat, DPRD bertugas untuk menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan. Salah satu fungsi utama DPRD adalah legislasi, yang merupakan proses mentransformasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan resmi berupa peraturan daerah (Dachi, 2022). Selain itu, DPRD juga berperan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.

Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dan keberlanjutan (Guntoro, 2021). Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta. DPRD memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah, dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan untuk memastikan hasil

pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran DPRD Deli Serdang dalam pengawasan pembangunan, komunikasi dengan masyarakat, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Haryono (2023), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, baik berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun perilaku yang dapat diamati.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, serta observasi terhadap kegiatan DPRD dan interaksi dengan masyarakat. Menurut Ardiansyah et al. (2023), wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui dialog atau percakapan, sehingga memungkinkan peneliti memahami perspektif, pengalaman, atau pendapat partisipan terkait topik yang diteliti. Pada sesi wawancara ini menggunakan pertanyaan sebanyak 12 indikator pertanyaan.

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema utama terkait komunikasi publik, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan peran hubungan masyarakat dalam membangun citra positif DPRD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kinerja dan integritas dewan, serta peran mereka dalam

mendorong partisipasi publik dan memajukan pembangunan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan salah satu informan yang merupakan Wakil DPRD Deli Serdang, pada Selasa, 19 November 2024, pukul 14.00 WIB, di Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Tj. Gabus 1, Kec. Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Beberapa hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Prioritas Program DPRD

Dalam wawancara, informan menyatakan bahwa prioritas utama anggota DPRD adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan lapangan pekerjaan. Beliau menegaskan, "Yang paling besar itu ya pekerjaan dan kesehatan, itu yang paling mendasar" (Syahputra, 2024). Sebagai wakil rakyat, beliau berpendapat bahwa kinerja dan integritas dewan akan tercapai apabila program-program yang dijanjikan selama kampanye dapat terealisasi dengan baik.

Dalam meningkatkan Kinerja dan Integritas Dewan Anggota DPRD memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan dasar ini diyakini akan meningkatkan kinerja dan integritas dewan, sehingga kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan daerah. Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Partisipasi Publik

Informan juga mengungkapkan bahwa setiap anggota DPRD memiliki gaya komunikasi yang berbeda tergantung pada partai dan konstituennya. Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan fleksibel. "Komunikasinya tergantung situasinya," ujarnya (Syahputra, 2024).

Beliau menyatakan bahwa tugas utama DPRD adalah berbicara dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada eksekutif, sehingga keterampilan komunikasi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas tersebut. Anggota DPRD menekankan pentingnya

komunikasi yang terbuka dan fleksibel dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada eksekutif. Komunikasi yang efektif akan memperkuat partisipasi publik, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja dewan.

Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Informan menyoroti pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah. Beliau mengamati bahwa tingkat partisipasi politik pemuda telah meningkat dibandingkan dengan 10 hingga 15 tahun yang lalu. "Sekarang anak-anak muda sudah mulai melekat politik. Kalau dulu, anak muda dianggap buta politik, sekarang mereka harus tahu politik," ujar beliau (Syahputra, 2024). Pemuda dianggap memiliki potensi besar dalam memperbaiki sistem politik dan pemerintahan, di mana keterlibatan generasi muda dalam pengambilan keputusan politik sangat penting dalam menciptakan perubahan positif.

Mekanisme Penyampaian Aspirasi Masyarakat

Informan menjelaskan bahwa DPRD Deli Serdang aktif dalam menerima aspirasi dari masyarakat. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengadakan kunjungan langsung ke masyarakat. "Kami turun langsung ke masyarakat tiga kali setahun," kata beliau (Syahputra, 2024). Selain itu, DPRD Deli Serdang aktif menerima aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk kunjungan langsung dan partai politik. Hal ini memperkuat representasi politik, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih dalam pengambilan keputusan.

Pengawasan Internal untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Dalam hal pengawasan internal, informan mengungkapkan bahwa DPRD memiliki Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang bertugas memastikan bahwa anggota dewan tetap menjaga

integritasnya dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. "Kalau ada anggota dewan yang melanggar etika, BKD yang akan menanganinya," jelas beliau (Syahputra, 2024). DPRD Deli Serdang memiliki Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk memastikan anggota dewan menjaga integritas dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal ini penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penguatan Sistem Perlindungan Sosial

Dalam wawancara tersebut, informan juga menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat yang rentan. Menurut beliau, bantuan sosial (bansos) adalah salah satu program yang harus diperkuat, terutama dalam kondisi pasca-pandemi COVID-19. "Jika keuangan daerah memungkinkan, kami akan menambah anggaran untuk jaminan sosial," ujar beliau (Syahputra, 2024). DPRD Deli Serdang menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat rentan. Bantuan sosial dan jaminan sosial menjadi program prioritas, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Kolaborasi DPRD dengan Pemerintah Daerah

Informan mengungkapkan bahwa kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting dalam mewujudkan pembangunan sosial yang efektif. "Pemerintah dan DPRD harus sinergi, jika tidak, komunikasi akan terhambat," ujarnya (Syahputra, 2024). Kolaborasi yang sinergis antara DPRD dan pemerintah daerah penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Informan juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan

terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. "Setiap akhir tahun kita akan evaluasi pembangunan yang sudah dilakukan, apakah sesuai rencana atau tidak," kata beliau (Syahputra, 2024).

Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disalurkan digunakan dengan efisien dan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga ketika DPRD melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur setiap tahun, dapat dipastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan pembangunan sesuai dengan rencana.

Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Terkait dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, informan menyatakan bahwa salah satu fokus utama DPRD adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak dan mendorong program-program pengentasan kemiskinan. "Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan," ujar beliau (Syahputra, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi yang berbasis bantuan sosial sangat penting untuk mendukung masyarakat yang terdampak. Di mana Bantuan sosial yang efektif dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Partisipasi Publik

Dalam menghadapi era digital, DPRD Deli Serdang telah mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik. "Semua proses sudah mulai digital, mulai dari e-katalog untuk belanja anggaran, hingga pemantauan proyek pembangunan," ujarnya (Syahputra, 2024).

DPRD Deli Serdang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Publikasi dan Hubungan Masyarakat dalam Membangun Citra DPRD

Pentingnya publikasi yang efektif untuk membangun citra positif DPRD. Masih terdapat stigma negatif terhadap DPRD tetapi dengan pola komunikasi yang lebih terbuka, hal ini dapat diubah. "Harapannya dengan semangat baru, kita bisa mengubah stigma negatif terhadap DPRD," ujar beliau (Syahputra, 2024). Komunikasi publik yang terbuka dapat mengubah stigma negatif terhadap DPRD, meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja dewan dan membangun citra positif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Deli Serdang berupaya meningkatkan kinerja dan integritas dewan melalui berbagai strategi, termasuk komunikasi yang terbuka, pengawasan internal yang ketat, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, penguatan sistem perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi menjadi fokus utama untuk mendukung masyarakat yang terdampak. Dengan strategi komunikasi yang lebih efektif dan pemanfaatan media digital, diharapkan dapat tercipta partisipasi publik yang lebih besar dalam pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Widodo, A. (2022). Determinasi komunikasi pemasaran: Analisis iklan, personal selling, dan public relation. *Jurnal Manajemen Pemasaran dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 796. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam pengawasan dan kendala-kendala terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245
- Dachi, T. (2022). Evaluasi implementasi peraturan daerah sebagai sebuah hukum dalam rangka meningkatkan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Prointegrita*, 6(3), 32-46.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*. Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu.
- Nur, A., & Jidan, M. (2024). Analisis peranan teknologi dalam aspek kehidupan berkomunikasi di era digital. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 4(12).
- Permana, R. S. M., Sumarlina, E. S. N., & Darsa, U. A. (2020). Konsep "Parigeuing" dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi politik berdasarkan naskah Sunda kuno. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 253-264.
- Raainaa, N. A., & Zahrurrijal, M. M. (2024). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali. *AKUNTANSIKU*, 3(4), 186.
- Rozinovianti, & Alfian. (2023). Dampak gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pundi*, 7(1), 43